



**MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361  
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

Jakarta, 13 Januari 2011

Nomor : 13/BUA/PL/I/2011  
Lamp. :  
Perihal : Penegasan Kembali Pencatatan Barang Milik Negara  
Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dan  
Kendaraan Dinas Roda 2 ( Dua )

Kepada Yth,  
Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
Di -  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum atas Barang Milik Negara serta tindak lanjut dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan kendaraan tersebut telah diterima oleh seluruh satuan kerja pada wilayah hukum saudara, bahwa masih ditemukan pencatatan yang double (Mahkamah Agung RI mencatat dan Satuan Kerja juga mencatat) atau sebaliknya (Mahkamah Agung RI dan Satuan Kerja tidak mencatat), dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Bagi kendaraan dinas roda 4 (empat) maupun kendaraan dinas roda 2 (dua) yang telah diterima berikut surat-surat kelengkapannya (sesuai berita acara serah terima) oleh satuan kerja, maka pencatatannya agar dimasukkan pada aplikasi SIMAK BMN Satker masing-masing.
2. Bagi kendaraan dinas roda 4 (empat) yang telah diterima oleh Satuan Kerja namun surat-surat masih berada di Mahkamah Agung RI (belum balik nama) maka pencatatannya masuk pada aplikasi SIMAK Mahkamah Agung RI.

Demikian untuk dilaksanakan dan menyampaikan kepada seluruh unit / satuan kerja dalam lingkungan Pengadilan Tingkat Banding, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Kepala Badan Urusan Administrasi



*[Handwritten Signature]*  
**H. SUBAGYO,SH.,MM**  
NIP. 19570227 198003 1003

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
4. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
5. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
6. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI
7. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI